KADISDIK SUMBAR BELUM TERIMA LAPORAN, OMBUDSMAN DALAMI KASUS SURAT SAKTI

Selasa, 01 Agustus 2017 - Array

“Surat sakti yang menekan kepsek dalam penerimaan siswa baru itu masuk ke dalam dugaan maladministrasi. Semuanya s
dalam pendalaman” Adel Wahidi, Asisten Ombudsman Sumbar.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kasus surat sakti sebagai bentuk intimidasi terhadap kepala SMA dalam proses Pener
Peserta Didik Baru (PPDB) di Bukittinggi sampai di tangan Ombudsman Sumbar. Sejumlah kepala sekolah dipanggil untuk di
keterangan.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi menyebut, ada empat kepala sekolah yang dijadwalkan akan dipang

Mereka adalah Kepala SMAN 2 Bukittinggi, SMAN 3 Bukittinggi, SMAN 4 Bukittinggi dan SMAN 5 Bukittinggi. “Sudah
layangkan surat pemanggilan terhadap empat kepsek yang dipaksa menerima siswa,” terang Adel.

Dalam surat bernomor : 0305/SRT/0235.2017/Pdg-03/VII 2017, dijadwalkan empat kepala SMA diminta mendatangi Ombud
RI Perwakilan Sumbar pada Jumat (14/7) mendatang. “Kami ingin meminta klarifikasi dan penjelasan dari pim
masing-masing sekolah. Ini terkait beredarnya surat sakti yang dikeluhkan oleh masyarakat.. Surat sakti yang menekan k
dalam penerimaan siswa baru itu masuk ke dalam dugaan maladministrasi. Semuanya sedang dalam pendalaman," sebut Ad

Permasalahan seperti ini, terangnya tidak akan terjadi jika semua yang berhubungan dalam proses tersebut mengikuti pro
dan aturan yang telah ditetapkan. "Proses PPDB mestinya kan sederhana saja. Ada syarat, ketentuan nilai, dan lainnya. Me
proses ini, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, apalagi oleh surat sakti, rekomendasi dan seterusnya. Kan sudah ada
pendaftaran, seleksi, dan pengumumannya. Jika anaknya tidak diterima, ya dengan legowo saja merelakan sang bua
menempuh pendidikan di tempat yang lain, tanpa terus memaksakan kehendak," ulasnya.

Disdik Sumbar Belum Terima Laporan

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Burhasman Bur mengaku belum menerima laporan terkait adanya intimidasi ter
kepsek dalam penerimaan siswa baru. Intimidasi itu datang dari sejumlah pejabat dan orang berpengaruh, dengan tujuan
anak atau kerabatnya bisa diterima bersekolah. “Belum ada laporan masuk, terkait ratusan surat sakti itu,” ungkap Burhasma
Senin (10/7).

Dia mengatakan, dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik untuk sekolah yang berada di tingkat kabupate
kota, maupun yang di daerah, semuanya melalui koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Sumbar. “Koordinasi terb
dengan baik, tapi untuk di Bukittinggi, memang belum ada laporan masuk,” ungkapnya.

Burhasman mengatakan, jika siswa yang direkomendasikan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di sekolah ter
maka keputusan diterima atau tidaknya merupakan keputusan mutlak sekolah. “Sudah ada aturan dalam proses pener
peserta didik baru. Pihak sekolah tinggal menjalankan berdasarkan prosedur yang ada. Jika ada pihak pejabat
merekomendasikan, maka wewenang sekolah yang melakukan seleksi, apakah semua siswa tersebut layak atau tidak dite
katanya.

Berdampak ke Mutu Pendidikan

Pengamat Pendidikan dan Koordinator Kopertis Wilayah X, Herri mengatakan, jika ada unsur subjektif atau campur tanga
pihak luar yang dapat mengintimidasi sekolah, maka hal tersebut akan berdampak terhadap mutu dan kualitas pendidikan
ada unsur kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru, hal ini dapat mengakibatkan menurunkan mutu dan ku
pendidikan. Selain itu, dapat merugikan banyak pihak, salah satunya kesempatan siswa yang seharusnya bersekolah di se
yang diinginkannya tidak dapat terwujud,” kata Herri.

Ia mengatakan, jika memang ada rekomendasi dari pihak tertentu hal ini harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan se
Seperti halnya merekomendasikan siswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. “Jika siswa
direkomendasikan sarat dengan berbagai prestasi, maka hal tersebut wajar saja. Apalagi jika direkomendasikan ke sekolah
memiliki kualitas pendidikan yang bagus. Hal ini dapat mendorong meningkatkan prestasi si anak dan meningkatkan ku

pendidikan," katanya.
Lanjutnya, sekolah seharusnya mampu menjadi jalan penghubung bagi siswa untuk mencapai sukses di masa depan. sekolah harus selektif dan mengutamakan kepentikan masyakat banyak. Sehingga, mutu pendidikan semakin berkemban dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumbar, Ismunandi Sofyan menemukan sejumlah fakta mencengangkan dalam Penerimaan P Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun ajaran 2017-2018 di Bukittinggi. Proses PPDB sarat intimidasi terhadap kepala se agar meloloskan siswa tertentu dalam penerimaan. Pelakunya, kebanyakan pejabat daerah yang memiliki pengaruh kuat.

Para pejabat melakukan intimidasi dengan modus membuat memo atau lazim disebut "surat sakti", agar kepala sekolah mer siswa tertentu. "Ini sangat memiriskan. Proses penerimaan peserta didik yang seharusnya bebas dari segala macam intim malah menjadi ladang intimidasi. Pelakunya kebanyakan pejabat," terang Komisi III DPRD Sumbar Ismundi Sofyan melakukan peninjauan ke SMA di Bukittinggi, akhir pekan lalu.

Kunjungan lapangan yang dilakukan disamping untuk melihat kondisi sekolah juga untuk mengetahui proses PPDB tahun 2017-2018. Sekolah yang dikunjungi, yakninya SMAN 2 Bukittinggi, SMAN 3, SMAN 4 dan SMAN 5. "Dari kunjungan lap yang kami lakukan, hampir semua SMA di Bukittinggi ditemukan katabalece atau surat sakti dari sejumlah pihak yang ditu kepada kepala sekolah. Tujuannya memaksakan agar siswa tertentu dapat diterima. Surat sakti itu ada yang dikirimkan beberapa orang penting di Bukittinggi bahkan provinsi," ujar Ismunandi Syofyan.

Dari pengakuan kepala sekolah kata Ismunandi Syofyan, surat saksi yang mereka terima pada tahun ajaran baru, juml mencapai 100 hingga 150 surat. Melalui surat sakti itu, sejumlah orang penting merekomendasikan sejumlah nama agar yang bersangkutan dapat diterima. Adanya surat sakti itu, kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau merekomendasikannya. Sehingga hampir di semua sekolah ada siswa titipan yang masuk menggunakan surat sakti ter "Jumlahnya ratusan," sebut Syofyan.

Diakui Syofyan, pihaknya juga tidak bisa menampik permainan surat sakti dalam PPDB. Namun jika surat sakti itu mer 100-150 surat sakti, katanya sangat disayangkan karena akan mengganggu dalam proses penerimaannya. "Jika surat sa hanya berkisar 5 -10 orang itu hal yang wajar dalam PPDB dan bisa ditolerir. Namun ini ratusan surat sakti yang dipegang kepala sekolah. Sudah tidak wajar," terang anggota DPRD Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan Bukittinggi - tersebut.

Surat sakti itu ada yang berasal dari sejumlah pejabat dan orang orang penting yang memnginkan siswa yang bersangkutan diterima. Bahkan surat sakti itu ada yang berasal dari luar kota Bukittinggi. "Surat sakti itu tidak hanya berasal dari Bukittingg ada yang berasal dari daerah tetangga seperti dari Agam, Pasaman dan Pariaman. Hal inilah yang membuat kami m kebingungan, kok sebegitu besarnya intimidasi dalam penerimaan siswa di Bukittinggi,"lanjut Syofyan. (h/mg-adl/mg-eby)

Sumber: